

# Wawasan Kebangsaan Kelompok Salafi di Nusa Tenggara Barat: Studi Kelompok Salafi di Pondok Pesantren Daarusy-Syifaa'

H. Bashori A. Hakim

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Diterima redaksi tanggal 14 Mei 2014, diseleksi 10 Juli 2014, dan direvisi 18 Agustus 2014

## Abstract

*The research questions posed in this study are: (1) What are the views of the Salafis in Pesantren Abu Hurairah in Mataram and Pesantren Daarusy Syifaa' in Selong on concepts of nationality and Islam, as well as the relationship between these two entities; (2) What is their idea of the ideal form of the Republic of Indonesia, Pancasila, the Constitution of 1945 and the Bhinneka Tunggal Ika (Unity in diversity) view of nation and state; and (3) Do their views on the above disturb or pose a threat to the integrity of national life for Indonesians?*

*This study aims to: (1) Provide a comprehensive overview of Salafi views on the concept of nationality and Islam and the relationship between them; (2) Provide an overview of their views on the concept of the Republic of Indonesia, Pancasila, Constitution of 1945 and Bhinneka Tunggal Ika (Unity in diversity) in the context of the nation in accordance with their ideal state; and (3) Provide an overview of their opinions on the aforementioned four pillars that may be perceived as a threat to the integrity of national life for Indonesians. The results of this study is useful for the Ministry of Religious Affairs and its relevant agencies for the formulation of some policies for improving teaching in pesantrens on Indonesia's national framework. For the pesantren leaders concerned, the results of this study are can help enhance Islamic brotherhood, as well nation brotherhood.*

**Keywords:** Islam, Nationality, Salafi, Radicalism

## Abstraksi

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan kelompok salafi di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram dan di Pondok Pesantren Daarusy- Syifaa' di Selong, terkait konsep kebangsaan dan Islam serta kaitan di antara keduanya; (2) Bagaimana pandangan ideal mereka tentang: bentuk Negara-NKRI, Pancasila, UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika dalam pandangan hidup berbangsa dan bernegara; dan (3) Apakah pandangan mereka terhadap empat pilar di atas dapat dianggap sebagai hal yang meresahkan, bahkan ancaman bagi integritas berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pandangan kelompok keagamaan di atas, tentang konsep kebangsaan dan Islam dan kaitan di antara keduanya; (2) Memperoleh gambaran mengenai pandangan mereka tentang konsep bentuk negara (NKRI), Pancasila, UUD'45 dan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks hidup berbangsa terkait dengan pandangan mereka mengenai negara yang ideal; dan (3) Memperoleh gambaran tentang pandangan mereka terhadap empat pilar di atas yang dapat dianggap sebagai hal yang meresahkan, bahkan ancaman terhadap integritas kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini berguna bagi Kementerian Agama dan instansi terkait sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dalam upaya peningkatan pembinaan pondok pesantren agar lebih berwawasan kebangsaan dalam bingkai NKRI. Bagi para pimpinan pondok pesantren yang bersangkutan, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah sekaligus ukhuwah wathoniyah.

**Kata Kunci:** Islam, Kebangsaan, Salafi, Radikalisme

## Pendahuluan

Secara historis, lahirnya isu-isu nasionalisme dan kebangsaan di kalangan umat Islam pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap trend kebangkitan modernitas Barat. Fazlurrahman menengarai, reaksi itu muncul ketika gelombang *westernisasi* yang muncul pada abad ke-18 dan ke-19 melanda dunia Islam. Pengaruh modernitas Barat ini kemudian menyebar ke struktur yang lebih luas, antara lain dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan dalam hal kebangsaan, yang selanjutnya melahirkan konsep-konsep negara kebangsaan modern. Dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa kasus di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim tidaklah sama dengan kasus-kasus di Barat dalam memahami konsep kebangsaan (Esposito, 1999:650-684). Di negara-negara kawasan Eropa, munculnya konsep kebangsaan atau nasionalisme merupakan akibat dari perlawanan terhadap kekuasaan feodal ketika itu (Simmons, 2007:250-273). Sedangkan nasionalisme atau paham kebangsaan yang muncul di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti di semenanjung Arab, Timur Tengah dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, muncul dari perlawanan terhadap penjajahan (Nasr, 1999:549-599).

Dalam perkembangannya, kemunculan ideologi nasionalisme atau paham kebangsaan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim mengalami dinamika yang panjang. Bahkan perdebatan tentang bentuk negara dan paham kebangsaan terus berlanjut hingga saat ini. Sebagai contoh, Al-Maududi berpendapat bahwa "negara Islam" haruslah ditegakkan dan dibangun berdasarkan perintah al-Quran, agar kaum Mukmin taat kepada Allah dan rasul-Nya serta pemimpin dari kalangan mereka. Menurut Al-Maududi, pengertian "*ulil amri*" sebagaimana

disebutkan dalam al-Quran Surat An-Nisa Ayat 59 adalah penguasa Muslim di suatu negara, tidak hanya pemimpin dalam satu keluarga, masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, kewajiban taat kepada pemimpin menjadi sangat penting untuk dapat melaksanakan Syariat Islam. Karena itu, secara otomatis negara Islam menjadi suatu keharusan (Al-Maududi, 1988:67).

Pandangan lain menyebutkan bahwa mewujudkan negara Islam bukanlah suatu kewajiban karena menurut mereka antara agama dengan negara harus dipisahkan pengelolannya. Konsep demikian sering disebut sebagai konsep sekuler karena bertitik tolak dari pandangan Barat yang menyatakan: "Berikan apa-apa yang menjadi hak kaisar dan berikan hak gereja apa-apa yang menjadi haknya" (Lewis, 2002:96-97).

Terkait kasus yang terjadi di Indonesia, rumusan konsep bernegara tidak menyebutkan secara formal sebagai negara Islam, tetapi juga tidak mengindikasikan sebagai negara sekuler yang memisahkan secara tegas antara negara dengan agama. Indonesia mengambil bentuk negara kesatuan dengan rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara. Pancasila dan rumusan "negara kesatuan" dipergunakan sebagai alat pengikat seluruh komponen masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi budaya, suku dan agama dalam wadah negara kesatuan dengan tidak mengorbankan kepentingan agama, suku dan budaya masing-masing di satu sisi, serta tidak mengorbankan negara di sisi lain. Dengan demikian antara negara dengan agama menjadi satu kesatuan yang integral. Dalam kehidupan keagamaan, agama mengatur kehidupan umatnya dalam berbangsa dan bernegara. Namun

dalam konteks NKRI konsep tersebut tidak berarti negara harus berlabel Islam (Natsir, 1973:429-450). Konsep demikian mewarnai pemikiran para pemimpin Islam pada awal kemerdekaan dan dengan berlapang dada rela menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta, semata-mata demi keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, terdapat kelompok keagamaan Islam yang kembali mempertanyakan konsep kebangsaan. Bagi kelompok ini Syariat Islam menjadi penting untuk diterapkan, karena tidak hanya menyangkut persoalan hukum saja, tetapi juga berfungsi untuk membimbing, mengayomi, menjamin keamanan dan keselamatan serta kesejahteraan seluruh masyarakat. Kelompok ini menghendaki bangsa Indonesia kembali kepada Islam yang "*rahmatan lil 'alamin*", tidak sekadar memeralat Islam untuk penguatan eksistensi diri. Beberapa peristiwa menunjukkan munculnya kelompok-kelompok Islam yang kembali menggugat paham kebangsaan, Pancasila dan NKRI dengan mempertentangkannya dengan konsep Islam. Hal ini dapat dilihat dari fenomena munculnya kasus Negara Islam Indonesia (NII) (Media Indonesia, 2 Mei 2011), Hizbut Tahrir (Farid Wajdi dalam <http://hizbut-tahrir.or.id>), adanya siswa tidak hormat bendera (Koran Tempo, 26 Juli 2011), serta rendahnya pemahaman keagamaan di kalangan sebagian kaum muda yang mengakibatkan munculnya ide-ide radikal yang mempertanyakan keabsahan NKRI dan Pancasila, bahkan berkeinginan mengganti bentuk negara dengan bentuk yang dianggap sesuai dengan Islam (Suara Merdeka, 13 Juni 2011).

Kasus-kasus di atas menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan, antara lain mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang menyatakan bahwa NKRI yang berlandaskan Pancasila sudah final,

karena itu ormas-ormas Islam yang mengusung Syariat Islam diminta agar memahami dan mengerti landasan negara ini (Media Indonesia, 31 Agustus 2011).

Kondisi-kondisi sebagaimana uraian di atas melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang wawasan kebangsaan kelompok keagamaan Islam di berbagai daerah oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2012 termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB) guna mengkaji wawasan kebangsaan kelompok keagamaan *salafi*.

Di NTB – yang mayoritas penduduknya beragama Islam – terdapat pondok pesantren yang jumlahnya mencapai ratusan dan tersebar di berbagai kabupaten/kota. Di antara pondok-pondok pesantren tersebut ada yang diasuh/dikelola oleh kelompok *salafi* sehingga pondok pesantren yang dikelola pun tergolong ke dalam corak pondok pesantren *salafi*. Kelompok keagamaan yang tergabung dalam pondok pesantren *salafi* ini menurut masyarakat Islam sekitar dinilai keras dalam hal penegakan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pemberantasan praktik keagamaan yang dianggap bid'ah dan khurafat. Dalam menyikapi perbedaan pemahaman dan praktik ajaran agama dengan umat Islam sekitar yang pada umumnya merupakan kalangan Nahdlatul Wathan (NW) dan Nahdlatul Ulama – meskipun pada dasarnya perbedaan lebih bersifat furuiyah – dimungkinkan ada di antara pondok pesantren yang pengasuh/pimpinannya menyikapi perbedaan tersebut dengan bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana dilakukan kelompok *salafi jihadis*.

Sesuai dengan judul penelitian, fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengungkap wawasan kebangsaan kelompok *salafi* di Pondok Pesantren Daarusy-Syifaa, Kabupaten Selong. Dalam mengungkap wawasan

kebangsaan terhadap kelompok salafi di Pondok Pesantren tersebut, penelitian ini merujuk pada pandangan kelompok salafi terhadap empat pilar wawasan kebangsaan – pada saat itu Pancasila merupakan salah satu pilar wawasan kebangsaan. Dengan kata lain, pada waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2012, digunakan paradigma “empat pilar wawasan kebangsaan”. Hal ini perlu dijelaskan di sini, mengingat empat pilar wawasan kebangsaan telah dihapus berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tanggal 3 April Tahun 2014 (<http://www.ugm.ac.id>, 8 April 2014). Penyebutan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan dalam naskah ini tentunya sama sekali tidak bermaksud menafikan Pancasila sebagai dasar negara.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pandangan kelompok salafi di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram dan di Pondok Pesantren Daarusy-Syifaa di Selong, terkait konsep kebangsaan dan Islam serta kaitan antara keduanya; (2) Bagaimana pandangan ideal mereka tentang: bentuk negara NKRI, Pancasila, UUD 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika dalam pandangan hidup berbangsa dan bernegara; dan (3) Apakah pandangan mereka terhadap empat pilar di atas dapat dianggap sebagai hal yang meresahkan, bahkan ancaman bagi integritas berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.

Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain: (1) Memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pandangan kelompok keagamaan Islam di atas, tentang konsep kebangsaan dan Islam berikut kaitan antara keduanya; (2) Memperoleh gambaran mengenai pandangan mereka tentang konsep bentuk negara (NKRI), Pancasila, UUD’45 dan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks hidup berbangsa terkait pandangan mereka mengenai bentuk negara yang

ideal; dan (3) Memperoleh gambaran tentang pandangan mereka terhadap empat pilar di atas yang dapat dianggap sebagai hal yang meresahkan, bahkan ancaman terhadap integritas kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian ini berguna bagi Kementerian Agama RI dan instansi terkait sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dalam upaya peningkatan pembinaan pondok pesantren agar lebih berwawasan kebangsaan dalam bingkai NKRI. Bagi para pengasuh/pimpinan pondok pesantren yang bersangkutan, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan *ukhuwah Islamiyah* sekaligus *ukhuwah wathoniyah*.

### Kerangka Konseptual

Dalam tulisan ini terdapat beberapa istilah yang secara konseptual perlu dijelaskan, antara lain: *Pertama*, Salafi. Salafi merupakan gerakan pemurnian ajaran Islam yang berusaha mengembalikan pemahaman agama menurut paham generasi *salafus shaleh*, yakni kelompok umat Islam yang hidup di tiga zaman pada masa awal perkembangan Islam. Mereka adalah generasi sahabat Nabi SAW, tabiin dan tabiit-tabiin. Ketiga kurun itu dipandang/dipercaya sebagai zaman terbaik dalam perkembangan Islam. Orang-orang yang hidup pada masa itu dinilai *salafi* sebagai orang-orang yang kompetensinya dalam memahami Islam tidak tertandingi oleh siapapun yang lahir setelah tiga generasi di atas, karena belajar agama langsung dari Nabi SAW, para sahabat Nabi atau murid dari para sahabat Nabi.

Dalam konteks dunia modern, gerakan *salafi* adalah gerakan neo-Wahabi, tetapi dalam soal fikih menganut paham non-mazhab, dalam arti keempat mazhab fikih dapat mereka rujuk asalkan fatwa

hukumnya merujuk kepada nash-nash al-Quran dan Hadits. Sedangkan Wahabi hanya merujuk kepada mazhab Hambali. Ciri utama *salafi* adalah menolak bid'ah, yaitu perkara baru yang diada-adakan – dalam hal agama – tanpa ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya, peringatan Maulid Nabi, Isro Miraj dipandangan sebagai perbuatan haram. Menurut Ibnu Taimiyah – salah seorang tokoh gerakan *salafi* - para pelaku bid'ah boleh dibunuh karena selain dianggap keluar dari Islam, mereka dianggap sebagai penyebar kerusakan di muka bumi (Solahuddin, 2011:8-10).

Di antara karakter kelompok *salafi* yaitu memusatkan kegiatan kepada penyebaran Islam melalui pembinaan terhadap pemurnian akidah, keimanan dan tauhid, semata-mata berdasarkan al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam pendidikannya, mereka sangat menekankan terhadap kemampuan bahasa Arab, namun pemahaman mereka terhadap al-Quran dan al-Hadits cenderung bersifat literal dan dogmatis. Cara pandang dalam menyikapi permasalahan bertolak dari sudut pandang Islam yang secara umum bersifat puritan, menolak pandangan dan konsep dari Barat, cenderung menghindari kegiatan politik dan bahkan mencela kelompok politik yang suka membawa agama. Meskipun menghindari kegiatan politik, bukan berarti mereka tidak memiliki pandangan politik. Mereka mempunyai cita-cita mewujudkan komunitas dan umat yang beriman dalam sebuah jamaah yang saling terhubung dan bersifat piramidal. Mereka cenderung tidak mengakui adanya nasionalisme dan negara bangsa, tetapi menerima pemerintahan Muslim dari kelompok manapun (Harmanza, 2012).

*Kedua, Salafi Jihadi/Jihadis. Salafi Jihadi* merupakan pecahan dari *salafi*. Dalam perkembangan selanjutnya *salafi jihadi* cenderung membedakan

diri dari *salafi*. Perbedaannya terletak pada pemahaman tentang bagaimana mewujudkan peradaban Islam. *Salafi* lebih menyukai cara-cara damai dalam menciptakan peradaban Islam, sedangkan *salafi jihadi* lebih menginginkan perubahan secara segera dengan cara-cara yang revolusioner. Baik *salafi* maupun *salafi jihadi* sama-sama dari kelompok yang mengusung *puritanisme*. Namun *salafi jihadi* cenderung tidak sabar menghadapi praktik-praktik yang mereka nilai sebagai penyimpangan yang ada di sekitar mereka, dengan melakukan tindak kekerasan sebagai ekspresi ketidaksetujuan mereka.

Awal kemunculan *salafi jihadi* merupakan bentuk perjuangan bersenjata terhadap pemerintah kolonial. Kemunculan kelompok ini banyak dipengaruhi oleh doktrin jihad yang dicetuskan oleh Sayyid Qutub, tokoh Ikhwanul Muslimin. Menurut Qutub, dalam memerangi rezim pemeritahan yang tidak saleh, sebelum memerangi musuh jauh (Israel) umat Islam terlebih dahulu harus memerangi musuh yang dekat (Pemerintah Mesir). Pandangan Qutub ini kemudian mempengaruhi kelompok-kelompok pejuang Islam dan pemikitan tentang jihad itu berkembang ke berbagai negara Muslim dalam bentuk kelompok-kelompok perjuangan bersenjata (Harmanza, 2012).

Dilihat dari segi ruang gerakannya, *salafi jihadi* terbagi menjadi 3, yakni: (1). Internal: mereka menjadikan rezim-rezim muslim lokal yang mereka nilai tak menyiarkan agama Islam dan membiarkan terjadinya maksiat; (2). Irredentism: melawan penjajahan negara Muslim oleh kekuatan Barat seperti yang terjadi di Afganistan, Kashmir, Mindanau/Filipina dan Palestina; (3). Global: perlawanannya ditujukan langsung kepada negara-negara Barat yang mereka anggap bertanggung jawab atas penderitaan umat Islam. *Salafi jihadi*

– demikian pula *salafi* - sebagai suatu gerakan keagamaan, sekalipun dalam realita kehidupan keagamaan ada di kalangan masyarakat, namun tidak ada kelompok keagamaan yang menamakan dirinya *salafi jihadi*, sekalipun upaya-upaya yang diperjuangkan dalam penegakan Syariat Islam oleh kelompok keagamaan tersebut sama sifat dan karakteristiknya dengan *salafi jihadi*. Oleh karena itu, term-term *salafi jihadi* seperti dijabarkan di atas, akan dipergunakan untuk rujukan dalam menenggarai pesantren-pesantren yang dijadikan sasaran kajian dalam penelitian ini, apakah tergolong *salafi jihadi* atau bukan.

*Ketiga, Wawasan Kebangsaan.* Wawasan kebangsaan adalah cara pandang ke dalam dan ke luar suatu bangsa maupun kelompok tertentu dalam masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan kebangsaan memiliki tiga dimensi: rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan adalah rasa memiliki yang tinggi dan bangga terhadap hasil karya dan budaya bangsa sendiri. Paham kebangsaan berkaitan dengan nasionalisme yang secara politis terimplementasikan ke dalam empat pilar tegaknya bangsa dan negara, yakni: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat kebangsaan merupakan sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi maka kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan dapat terelakkan dan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme (Suprpto, 2010).

*Keempat, Radikalisme.* Radikalisme yaitu kelompok yang mempunyai ideologis tinggi, fanatik, dan yang mereka perjuangkan adalah penggantian tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Islam radikal memiliki

karakteristik: mentalitas perang salib, penegakan hukum Islam, melawan pemerintah, menegakkan agama sebagai lambang supremasi hukum Tuhan, serta memandang ahli kitab sekarang adalah menyimpang atau kafir (Jajang). Konsep radikal Islam dapat diidentikkan dengan “fundamentalisme Islam”, dalam arti para pengusung gagasan ini menginginkan Islam seperti pada masa-masa awal Nabi.

*Kelima, Pimpinan Pondok Pesantren.* Pimpinan pondok pesantren yang dimaksud dalam kajian ini meliputi: unsur pengasuh dan pimpinan pondok serta guru/ustadz yang terdapat di pondok pesantren sebagaimana tertera dalam struktur kepemimpinan pondok pesantren yang dikaji.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kasus. Landasan teoritis yang dipergunakan adalah teori fenomenologi, yakni memahami gejala-gejala yang timbul dan berkembang di sekitar kita dengan menerima apa adanya untuk mengetahui hakekat sesuatu (Lawlor, 2002:11-166). Gejala-gejala berupa pemikiran keagamaan yang berkaitan dengan konsep kebangsaan dan negara serta agama yang dimunculkan oleh suatu kelompok keagamaan -dalam studi ini para pengasuh/pimpinan pondok pesantren *salafi* – dipahami secara utuh dengan cara mendengar dan menerima seluruh pandangan dan pemikiran mereka. Dengan mengetahui secara mendalam aspek-aspek fenomena serta kesadaran di balik fenomena tersebut, diharapkan dapat ditemukan hakekat dari fenomena yang berkembang itu.

Data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta pengamatan. Wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara

dilakukan kepada sejumlah informan yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat, meliputi: pengasuh/pimpinan pondok pesantren *salafi*, para tokoh masyarakat, organisasi/lembaga keagamaan (MUI), para pejabat Kantor Kementerian Agama serta para pejabat instansi terkait. Studi pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan menelaah buku-buku, artikel dan dokumen yang terkait dengan masalah yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang terjadi terhadap obyek yang dikaji selama di lapangan. Untuk memperoleh data yang akurat, dilakukan *cross-check* data secara triangulasi.

Untuk menentukan lokasi dan obyek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, mula-mula dilakukan pendataan awal tentang pondok pesantren-pondok pesantren *salafi* di NTB. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa kelompok *salafi jihadis* yang dijadikan sasaran kajian – sekalipun keberadaannya tidak terstruktur – mereka bergabung dan terkonsentrasi dalam pondok pesantren-pondok pesantren “*salafi*”.

Berdasarkan informasi awal diperoleh keterangan, di NTB ada beberapa pondok pesantren *salafi* yakni: Pondok Pesantren Abu Dzar al-Ghifari di Kediri dan Pondok Pesantren Nurul Hikmah di Lembar, Lombok Barat, Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram di Kota Mataram, Pondok Pesantren Daarusy Syifaa’ dan Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud di Labuhan Haji, Lombok Timur (Wawancara dengan Halil, mantan Kabid Pekapontren Kanwil Kemenag NTB, 25 September 2012; Ros.Kml dan Ahm. Kasr, Staf Bidang Pekapontren Kanwil Kemenag NTB, Jalaluddin, Kasub TU Kankemenag Kota Mataram, 26 September 2012; Fauz. A, Kasub TU Kankemenag Kabupaten Lotim, 29 September 2012; M.Ab.Arif, Kasub Bag

TU Kankemenag Lobar, L.Rusyd, Staf Seksi Pekapontren Kankemenag Lobar, 2 Oktober 2012).

Menurut para informan di atas, di antara para pengasuh/pimpinan pondok pesantren *salafi* di atas ada yang cenderung radikal dalam memperjuangkan Syariat Islam dan praktik ajaran agama sesuai al-Quran dan al-Hadits. Dimungkinkan di antaranya ada yang tergolong *salafi jihadis*. Berdasarkan penelusuran lebih mendalam kepada para informan, diperoleh penjelasan bahwa para pengasuh/pimpinan pondok pesantren *salafi* di atas dalam mendakwahkan aliran keagamaannya tidak sampai berbuat anarkis dan pemaksaan dengan cara-cara kekerasan. Hanya saja, di antara mereka ada yang cenderung keras dalam memperjuangkan tegaknya Syariat Islam berdasarkan al-Quran dan al-Hadist dengan melakukan aksi pemberantasan praktik bid’ah maupun khurafat yang terdapat di lingkungan mereka. Pondok pesantren yang pengasuh/pimpinannya dinilai radikal dimaksud adalah: Pondok Pesantren (PP) Abu Hurairah Mataram dan PP Daarusy-Syifaa’ di Selong. Masyarakat sekitar menilai kelompok *salafi* yang bernaung dalam Yayasan al-Hunafa – Pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah – adalah tergolong *salafi haraki* (Wawancara dengan Jamaludin, Pengasuh Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, 27 September 2012). Sedangkan Pondok Pesantren Daarusy-Syifaa’, dulu termasuk radikal karena dipimpin oleh kakak kandung Abu Jibril (Wawancara dengan Halil, mantan Pejabat Pekapontren Kanwil Kemenag NTB, 25 September 2012, Jalaluddin, Kepala TU Kankemenag Kota Mataram, 28 September 2012 dan Fauzan, Kepala TU Kankemenag Lotim, 29 September 2012).

Berdasarkan pertimbangan informasi di atas maka konsentrasi kajian dalam penelitian ini difokuskan

terhadap kelompok *salafi* di dua pondok pesantren di atas. Namun sesuai dengan judul naskah ini maka dalam tulisan ini dipaparkan hasil kajian terhadap kelompok salafi di Pondok Pesantren Daarusy-Syifa'. Kajian tentang gerakan salafi pernah dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan di beberapa daerah, antara lain: Kelompok Dakwah Salafi di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat oleh Nuhrison M. Nuh, Aliran Salafi di Aikmel Kabupaten Lombok Timur oleh Syuhada Abduh, Aliran Salafi di Kota Batam Kepulauan Riau oleh Haidlor Ali Ahmad Aliran Salafi di Kota Yogyakarta oleh Titik Suwariyati (Wakhid Sugiyarto (Ed.), 2009), dan Penelitian Kerukunan Umat Beragama di Nusa Tenggara Barat – Studi Tentang Gerakan Dakwah di Kalangan Umat Islam di Kota Mataram – oleh Bashori A. Hakim Obyek studi/sasaran dalam penelitian ini yaitu gerakan dakwah kelompok salafi di Yayasan al-Khunafa yang memiliki lembaga pendidikan Islam berupa Pondok Pesantren (*Salafi*) “Abu Hurairah Mataram” (Bashori A. Hakim, 2011).

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini lebih memfokuskan kajian tentang pandangan kelompok *salafi* – yang tergabung di dalam lembaga pendidikan Islam yakni pondok pesantren salafi – terhadap konsep-konsep kebangsaan dan Islam serta tentang empat pilar yakni: NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

### **Sekilas Kabupaten Lombok Timur**

Kabupaten Lombok Timur dengan ibukota di Selong, secara administratif terdiri atas 20 kecamatan. Jumlah penduduk di kabupaten ini mencapai 1.055.984 jiwa atau sekitar (22,77 %) dari seluruh jumlah penduduk NTB, tersebar secara hampir merata di setiap kecamatan

di Lombok Timur (Diolah dari Data Kegamaan Kanwil Kemenag Provinsi NTB, 2012).

Kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lombok Timur diwarnai oleh keragaman pekerjaan penduduk, antara lain: petani, pedagang, pegawai negeri (PNS) dan swasta, buruh serta penjas (BPS. Kota Mataram, 2010:47). Di bidang pendidikan, untuk kebutuhan pendidikan penduduk tersedia berbagai sarana pendidikan mulai jenjang terendah yakni Taman Kanak-Kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Di bidang politik, masyarakat Kabupaten Lombok Timur menyalurkan aspirasi politiknya antara lain di: Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKS, Hanura, Gerindra, BPR, PKPB, dan PPI. Hal ini terefleksi dari keterwakilan partai-partai di atas di DPRD Kota Mataram maupun Kabupaten Lombok Timur.

Kehidupan keagamaan umat Islam sebagaimana masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada umumnya terlihat lebih semarak dibanding dengan kehidupan keagamaan umat lain. Hal ini dapat dimengerti karena mayoritas penduduk di Kabupaten Selong beragama Islam dengan faham mayoritas Ahlussunnah. Jumlah umat Islam di Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.054.015 jiwa (99,81 %) dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan (0,19 %) selebihnya berturut-turut terdiri atas umat Hindu, Katolik, Kristen, Buddha dan Khonghucu (Diolah dari Data Keagamaan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi NTB, 2012). Di antara kegiatan keagamaan umat Islam di Kabupaten Lombok Timur, selain shalat berjamaah dan pengajian, juga terdapat kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Islam (PHBI). Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut mereka konsentrasikan di masjid-masjid maupun mushala yang jumlahnya mencapai ratusan, tersebar di setiap kecamatan.

Jumlah masjid di Kabupaten Lombok Timur 955 buah, mushala 2.139 buah. Sedangkan rumah ibadat umat lain, yakni pura tercatat 7 buah dan gereja Kristen 2 buah (Data Keagamaan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi NTB, 2012).

Keberadaan pondok-pondok pesantren ikut mewarnai kegiatan pendidikan keagamaan masyarakat. Di Lombok Timur terdapat 141 pondok pesantren. Di seluruh NTB tercatat tidak kurang dari 520 pondok pesantren. (Data Pekapontren Kanwil Kemenag Provinsi NTB, 2012). Di antara pondok pesantren tersebut terdapat sejumlah pondok pesantren Salafiyah, yakni pondok pesantren yang dalam proses belajar-mengajar pada malam hari para santri dibimbing oleh seorang Tuan Guru (Kyai) melalui sistem sorogan, dengan materi Kitab Kuning. Sedangkan pada pagi/siang hari belajar sistem klasikal secara berjenjang yakni tingkat Ula dan Wustho. Pondok pesantren Salafiyah ini memperoleh dana BOS dari Kantor Kementerian Agama (Wawancara dengan Ros Kom dan Ahm. Kasr, Seksi Pekapontren Kanwil Kemenag Provinsi NTB, 26 September 2012).

Maraknya kegiatan keagamaan umat Islam di Kabupaten Lombok Timur di atas tergambar pula secara hampir merata di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banyaknya masjid dengan bangunan yang rata-rata tergolong megah dan luas ini menjadikan NTB mendapat predikat sebagai daerah "seribu masjid". Selain itu, di kalangan komunitas Islam NTB terdapat organisasi kemasyarakatan Islam yang hingga kini masih cukup terkenal yakni *Nahdlatul Wathan* (NW). *Nahdlatul Wathan* (NW) merupakan organisasi kemasyarakatan Islam Ahlussunnah wal Jamaah 'ala Madzhabil Imamisy-Syafi'i yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah. NW didirikan oleh TGKH.

Muhammad Zainuddin Abdul Majid sejak tahun 1953 dan berpusat di Pancor-Lombok Timur (TGH. Abd. Hayyi N. dan Muhni Sn, 2005:12). Saat ini, seiring dengan perkembangan masyarakat Islam khususnya, NW selain bergerak di bidang pendidikan juga di bidang ekonomi dan kesehatan (Bashori, AH, 2011:13).

Selain NW terdapat pula organisasi keagamaan lainnya, seperti: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Hidayatullah, Tarbiyah Islamiyah, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Al-Hidayah. Keberadaan organisasi NU dan NW ini menjadikan corak pengamalan keagamaan dan praktik beribadah kebanyakan umat Islam di Kabupaten Lombok Timur serta NTB pada umumnya menganut mazhab Imam Syafi'i.

Selain organisasi-organisasi keagamaan di atas, terdapat Kelompok Salafi yang keberadaannya tidak terstruktur dan tidak berbentuk organisasi, namun lebih merupakan gerakan keagamaan Islam. Keberadaannya sekalipun relatif tidak sebesar dan sepopuler organisasi-organisasi keagamaan di atas namun terlihat memberikan warna tersendiri dalam dinamika kehidupan keagamaan khususnya dakwah Islamiyah di Lombok Timur karena mengemban misi pemurnian ajaran Islam.

Meskipun masing-masing organisasi dan kelompok keagamaan di atas memiliki spesifikasi tujuan dan pengamalan keagamaan berbeda-beda yang berpotensi menimbulkan konflik, namun tidak terlihat adanya praktik dakwah yang radikal misalnya berupa pemaksaan kepada umat Islam sekitar yang tidak sejalan dengan paham keagamaannya. Hal ini setidaknya terbukti dari hasil kajian tentang gerakan dakwah yang dilakukan oleh tiga organisasi dan/atau kelompok

keagamaan di Kota Mataram yakni NW, Muhammadiyah dan Kelompok Salafi (Bashori, AH, 2011:25).

### **Kelompok Salafi di Pondok Pesantren Daarusy-Syifaa' Kabupaten Lombok Timur**

Sejarah keberadaan kelompok *Salafi* di Pondok Pesantren Daarusy-Syifaa' tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan perkembangan pondok pesantren tempat mereka mengaktualisasikan gerakannya. Pondok Pesantren Islam (PPI) Daarusy-Syifaa' berawal dari keberadaan sebuah tempat mengaji pada bulan Agustus 1988 di Dasan Tereng Desa Korleko, yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Kecamatan Selong, (sekarang menjadi bagian dari Kecamatan Labuhan Haji) Kabupaten Lombok Timur. Awal keberadaannya juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pondok Pesantren Islam Ibnu Mas'ud di Jl. Cokroaminoto, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur yang semula bernama Pondok Pesantren Islam Al-Banna.

Sebelum tahun 1990-an, Masfi'i – nama aslinya Muhammad Syafi'i Syahid – bersama seorang temannya bernama Fadlullah menjadi pembina Pondok Pesantren An-Nur di Kota Mataram. Keduanya selaku pembina pondok pesantren berdomisili dan berasal dari Lombok Timur. Dengan alasan jarak terlalu jauh antara tempat tinggal keduanya dengan lokasi pondok yang dibina, maka dipindahlah pondok pesantren tersebut ke Sisik, Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur dan diberi nama Pondok Pesantren Islam Al-Banna. Pondok pesantren ini dibangun di atas tanah milik ibunda Fadlullah pada tahun 1990. Dalam perjalanannya, oleh karena sebagian para santri – terutama santri putrid – berasal dari Tirpas, maka Masfi'i pada tahun 1994 membangun pondok pesantren di Tirpas-Tirtanadi, Kecamatan

Labuhan Haji, Lombok Timur. Pondok pesantren dibangun di atas tanah wakaf dari ibundanya, dengan nama Pondok Pesantren Islam Daarusy-Syifaa', dengan murid para santri putri asal Tirpas yang semula mondok di Pondok Pesantren Islam Al-Banna.

Pondok Pesantren Al-Banna yang diasuh Fadlullah dalam perjalanan selanjutnya diganti nama menjadi Pondok Pesantren Islam Ibnu Mas'ud, karena khawatir ada kesan negatif dari masyarakat lantaran bernama Al-Banna (Wawancara dengan Masfi'i, Pendiri PP. Daarusy-Syifaa', 2 Oktober 2012). Penjelasan tersebut sekaligus menepis dugaan sementara kalangan di luar pondok pesantren yang menganggap bahwa didirikannya Pondok Pesantren Daarusy-Syifaa' karena ada perselisihan di antara pengurus Pondok Pesantren Al-Banna dalam pengelolaan pondok ketika itu (Wawancara dengan Abdul Hamid, Sekretaris. MUI Lotim, dan TG. H. Idhm, P3N Desa Korleko, Kec.Labuhan Haji, 1 Oktober 2012).

Pondok Pesantren Daarusy-Syifaa' yang berdiri sejak tahun 1994 berada di bawah Yayasan Islam Daarusy-Syifaa', dalam perkembangannya telah memiliki unit-unit pendidikan: Taman Kanak-Kanak (status terdaftar), Madrasah Ibtidaiyah (terakreditasi c), Madrasah Tsanawiyah (terakreditasi B), Kulliyatul Mu'allimin, yakni pendidikan keguruan untuk pria dan Kulliyatul Mu'allimat yakni pendidikan keguruan untuk wanita (Sejarah Pondok Pesantren Islam Daarusy-Syifaa', Proposal, 2009:6).

Sama halnya dengan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, gerakan kelompok salafi di Pondok Pesantren Islam Daarusy-Syifaa' berafiliasi dalam pondok pesantren, sehingga profil mereka tercermin dari profil pondok pesantren. Di antara mereka ada yang menjadi pimpinan dan pengurus Yayasan Islam Daarusy-Syifaa',

pimpinan pondok, pimpinan/ketua dan wakil ketua madrasah serta tenaga guru/ustadz di lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di Pondok Pesantren Islam Daarusy-Syifaa'. Lembaga-lembaga pendidikan dimaksud yaitu TK/RA, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Kulliyatul Mu'allimin/Kulliyatul Mu'allimat. Jumlah tenaga pendidik di pondok pesantren ini mencapai 36 orang, terdiri atas 15 laki-laki dan 26 perempuan. (Profil Pondok Pesantren Islam Daarusy-Syifaa', 2012).

Latar belakang pendidikan mereka di antaranya lulusan Timur Tengah, sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam (IAIN), sarjana pendidikan Islam dan Pondok Pesantren Salafi di berbagai daerah. Kitab rujukan yang mereka pergunakan selain *al-Quran* dan *al-Hadist*, antara lain: di bidang aqidah *Kitab Fathul Majid*, di bidang tafsir *Kitab Ibnu Katsir*, di bidang syari'ah *Kitab Minhajul Muslim*, di bidang hadits *Kitab Mustholah Hadits*, di bidang nahwu *Kitab Nahwul Wadliih*, di bidang shorof *Kitab Tasrif* dan di bidang akhlak yaitu buku-buku akhlak.

Dalam menyikapi Mazhab, seperti halnya kelompok salafi di Pondok Pesantren Abu Hurairah dan pondok-pondok pesantren salafi lainnya, kelompok salafi di Pondok Pesantren Islam Daarusy-Syifaa' tidak menganut salah satu mazhab, tetapi mengikuti Madzhab yang menurut penilaiannya paling rajah. Motto gerakan mereka dalam menerapkan dan menegakkan prinsip ajaran Islam sesuai yang diamalkan *salafus shalih* adalah "*bashthotan fil 'ilmi wal jism*", yakni kuat ilmu dan kuat fisik/jasmani. Menurut pandangan mereka, hal itu sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. "*al-muminul qowiyyu khoirun wa ahabbu ilallah*". Lebih lanjut, mereka mempunyai pandangan bahwa pelatihan fisik (*i'daad*) nilainya sama dengan pelaksanaan syari'at haji, sholat dan sebagainya. Mereka mendasarkan pandangan

tersebut kepada Firman Allah Surat Al-Anfaal Ayat 60 yaitu: "*wa a'iddu lahum-mastatho'tum min kuwwatin*" (wawancara dengan Masfi'i, Ketua Yayasan Islam Daarusy-Syifaa', 2 Oktober 2012).

### Pandangan Tentang Wawasan Kebangsaan

#### 1. Pandangan Tentang Simbol Negara Dikaitkan Dengan Islam

- a. *Tentang ada tidaknya ajaran Islam yang mewajibkan pemeluknya mendirikan suatu negara*

Dalam Islam ada syariat yang bisa dilaksanakan secara pribadi seperti: sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Ada pula syariat yang tidak bisa dilaksanakan kecuali adanya masyarakat, seperti menikah dan lainnya, dan ada pula syariat yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya kekuasaan negara, seperti: perang, perdamaian, pelaksanaan hudud, tawanan perang dan lain-lain. Menurut Islam, adanya kekuasaan negara merupakan kewajiban karena tanpa kekuasaan, Islam tak mungkin menjadi "*rahmatan lil 'alamin*". Karena itu ada kaidah usul mengatakan: "*maa laa yatimmu waajibun illaa bihii fahuwal waajibu*". Dalam Islam adanya negara merupakan naluri orang hidup, karena tanpa negara mereka tidak mungkin dapat membangun kebahagiaan. Sebagai contoh, keluarga merupakan miniatur sebuah negara. Manusia tidak mungkin hidup sendiri sekaligus tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Maka dibentuklah sebuah keluarga. Dari keluarga lahirlah kelompok, suku, kabilah, yang pada akhirnya membentuk sebuah negara (Lihat Al-Quran Surat 4/1).

b. *Tentang konsep jihad*

Jihad dalam Islam adalah sebagai HANKAM (pertahanan keamanan) atas sebuah kedaulatan. Di muka bumi ini tidak ada baik kafir maupun Muslim yang tidak memiliki sistem pertahanan. Tetapi kenapa ketika Islam memberikan sistem pertahanan untuk mendamaikan dunia dengan konsep jihadnya dicurigai?

c. *Tentang penting tidaknya bentuk/nama negara dengan sebutan Islam*

Bentuk/nama negara dengan sebutan Islam adalah penting. Ini sama halnya kita tidak suka jika disebut munafik, fasik, dhalim, kafir dan sebagainya.

d. *Tentang perlu atau tidaknya umat Islam melakukan upacara nasional memperingati hari bersejarah*

Umat Islam tidak perlu lagi melakukan upacara memperingati hari bersejarah seperti: hari kemerdekaan, sumpah pemuda, kebangkitan nasional dan hari pahlawan karena hanya menghabiskan energi dan dana. Lebih baik dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut dialihkan untuk menyantuni fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengundang mereka ke Istana Negara.

Dalam UUD 1945 disebutkan "Atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa", maka mestinya mensyukuri kemerdekaan itu harus dengan cara dan aturan yang dibenarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, bukan dengan cara dan aturan yang dibuat sendiri yang dapat membuat kita menyeleweng dari ajaran Allah. Firman Allah dalam Surat al-Kahfi Ayat 103-104: "Qul hal nunabbiukum bil ahsariina a'maalaa. Alladziina dlolla sa'yuhum fil hayaatiddun-yaa wa hum yabsabuuna annahum yuhsinuuna shun'aa".

e. *Tentang penghormatan dan pengibaran bendera Merah Putih oleh umat Islam*

Dalam ajaran Islam, kita tidak boleh menghormati benda hidup melebihi kapasitasnya, apalagi benda mati, karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Sabda Rasulullah SAW: "*Laa tathruunii kamaa athratan nashaaraa 'iisabnu maryama fa quula ibnu 'abdillah wa rasuuluh*" (HR. Muslim). Mensakralkan bendera sama saja seperti orang-orang kafir Quraisy mensakralkan patung-patung mereka.

f. *Tentang masih diperlukan atau tidaknya lambang negara Burung Garuda dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara*

Dalam ajaran Islam, bukanlah lambang yang bisa mempersatukan negara yang penduduknya majemuk dan plural, tetapi kesadaran umat beragamanya untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Itulah pengertian Islam sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW: "*Al-Islaamu man salimal muslimuuna min lisaanihi wa yadihi*".

g. *Tentang keharusan pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden di ruang-ruang formal*

Menghormati para pemimpin termasuk Presiden dan Wakil Presiden, tidak harus dengan cara memajang fotonya di ruang-ruang formal seperti di ruang kantor atau ruang sekolah.

h. *Tentang penting tidaknya TVRI dan RRI sebagai media untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan rasa cinta tanah air*

TVRI dan RRI benar menjadi media penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, sepanjang tidak dipergunakan

sebagai media provokasi dan kemaksiatan dalam penyiarannya.

## 2. Pandangan Tentang Isi dan Pelaksanaan 4 Pilar Kebangsaan

- a. *Tentang penting tidaknya faktor kesukuan dalam mewujudkan peran sebagai khalifah Allah di bumi*

Suku adalah penting untuk kekuatan, bukan untuk merusak dan memecah-belah. Firman Allah: *"Yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dzakarini wa untasaa, wa ja'alnaakum syu-uuban wa qabaa-ila li ta'arafuu"* (al-Quran: Surat al-Hujurat, Ayat 13). Ketaatan warga negara kepada pemimpinnya sangat penting sepanjang pemimpinnya itu tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah: *"Athii'ullaaha wa athii'urrasuula wa ulil amri minkum"* (al-Quran: Surat an-Nisa Ayat 59).

- b. *Tentang keberadaan kelompok/suku-suku dalam wujud kebangsaan*

Kelompok/suku-suku yang ada dalam wujud kebangsaan, belum sesuai dengan Islam karena mereka belum melaksanakan al-Quran dan al-Hadist serta UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2.

- c. *Tentang kebangsaan Indonesia*

Setiap orang berbeda dalam memberikan penafsiran tentang kebangsaan.

- d. *Tentang negatif tidaknya dampak konsep kebangsaan bagi keberagaman seorang muslim:*

Hal yang menyebabkan dampak negatif bagi keberagaman seseorang bukan dari agamanya, tetapi karena adanya permusuhan dari kalangan warga negara yang disebabkan oleh

persoalan politik, ekonomi, hukum/ketidakadilan, dan lain-lain.

- e. *Tentang sudah atau belum Pancasila mencerminkan nilai-nilai Islam seperti: tauhid, kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan dan musyawarah*

Belum pernah mendengar penjelasan pengertian tentang tauhid, kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan dan musyawarah menurut Pancasila. Jadi tidak bisa memberikan pandangan tentang hal itu.

- f. *Tentang masih relevan tidaknya Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bagi bangsa Indonesia yang Muslim*

Belum diketahui bukti secara konkrit tentang orang yang paling Pancasila atau konsekuensi dalam melaksanakan Pancasila sejak Pancasila dibuat oleh Soekarno, untuk dijadikan contoh.

- g. *Tentang telah sesuai ataukah belum realitas di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila*

Di dalam sebuah negara ada dua pilar pokok yang harus menjadi penyangganya, yaitu sistem pemerintahan yang baik dan pelaksanaannya harus orang-orang yang saleh. Dua hal ini harus tercermin dalam pemerintahan negara kita.

- h. *Tentang keragaman budaya di Indonesia apakah menjadi penghalang bagi pelaksanaan ajaran Islam*

Sebenarnya keragaman budaya tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia, tetapi justru para penguasa yang secara sengaja menghalang-halangi.

- i. *Tentang sistem pemerintahan apakah menjadi penghalang bagi pelaksanaan ajaran Islam*

Hal yang menjadi penghalang bukan sistemnya, tetapi para penguasanya yang sengaja menghalang-halangi.

- j. *Tentang selaras atau tidaknya pembukaan dan pasal maupun ayat dalam UUD 1945 dengan ajaran Islam*

UUD 1945 perlu dikembalikan sebagaimana ketika sebelum dikhianati, dengan memasukkan kembali kata-kata “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

- k. *Tentang setuju tidaknya UUD 1945 sebagai landasan hukum bagi umat Islam di Indonesia*

Semua undang-undang ciptaan manusia tidak ada yang sempurna. Maka dari itu bagaimana mungkin sesuatu yang tidak sempurna dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Bukti ketidaksempurnaannya yaitu adanya amandemen terhadap UUD tersebut. Jika telah sempurna mengapa diamandemen.

- l. *Tentang penting tidaknya NKRI terus dijaga dan dipertahanan sebagai bentuk negara bangsa*

Betapapun, NKRI harus dipertahankan. Mempertahankannya merupakan suatu ibadah.

- m. *Tentang relevan tidaknya NKRI dengan konsep negara dalam Islam*

NKRI adalah negara Islam, tapi kemudian dikhianati. Fakta sejarahnya antara lain:

1. Jauh sejak sebelum Indonesia merdeka, telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang melaksanakan Syariat Islam;
2. Di dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, merupakan pengakuan yang

tulus dari para pendiri negeri ini. Tapi sayang bangsa kita menolak ajaran-ajaran Allah yang telah memberi rahmat;

3. Dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan: “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tetapi kenapa bangsa ini melaksanakan demokrasi yang tidak menjadi dasar negara kita;
4. Adanya Piagam Jakarta yang kemudian dikhianati, yakni dicoretnya 7 kata yang terdapat dalam sila pertama, yaitu: “..dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya;
5. Menurut Imam Syafi’i, jika simbol-simbol Islam di suatu negara lebih dominan, maka negara tersebut adalah negara Islam. Jadi jangan dipertentangkan untuk mencurigai kanan maupun kiri.

- n. *Tentang ada atau tidaknya landasan mengenai cinta tanah air dan bangsa dalam Islam*

Persoalannya bukan karena tanah airnya/tumpah darahnya, melainkan kita cinta negeri kita karena melaksanakan Syariat Allah.

- o. *Tentang perlu tidaknya pemberian bekal mengenai wawasan kebangsaan kepada seluruh warga negara*

Jika pembekalan itu dipandang perlu, tidak masalah untuk dilakukan.

- p. *Tentang perlu tidaknya terus membela dan mempertahankan NKRI sebagai suatu negara yang berdaulat*

NKRI sebagai suatu negara harus dipertahankan, tetapi pemerintahnya harus diadakan pergantian.

- q. *Tentang Pancasila merupakan rumusan yang bersumber dari nilai-nilai ajaran*

*Islam yang dirumuskan para ulama dan pemikir Islam*

Pancasila yang sekarang ini bukan hasil rumusan para ulama, tetapi Soekarno.

- r. *Tentang sesuai tidaknya nilai demokrasi dalam UUD 1945 dan Pancasila dengan ajaran Islam:*

Di antara nilai demokrasi dalam UUD 1945 dan Pancasila ada yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi banyak yang tidak sesuai.

3. *Pandangan Tentang Pluralitas Bangsa Yang Tercermin Dari Bhinneka Tunggal Ika*

- a. *Tentang kesukuan dan keragaman manusia menurut pandangan Islam*

Dalam pandangan Islam, Allah menciptakan manusia dengan segala keragamannya. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Justru yang perlu ditanyakan/diperjelas adalah "apa tafsiran Bhinneka Tunggal Ika menurut Pancasila dan UUD 1945".

- b. *Konsep menurut Islam tentang tugas dan kewajiban diciptakannya manusia di bumi*

Menurut konsep Islam, tugas dan kewajiban manusia diciptakan di bumi adalah selaku penebar kedamaian, keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh manusia.

- c. *Tentang anjuran untuk mencintai dan menjaga kerabat atau hal-hal terdekat menurut Islam*

Dapat dilakukan dengan antara lain membangun silaturahmi dan persaudaraan berdasarkan keimanan kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW.

- d. *Tentang dekat tidaknya lingkungan dan bumi yang kita tempati*

Bahwa lingkungan dan bumi yang kita tempati kita anggap dekat dengan kita, sehingga harus kita jaga dan pelihara dari kerusakan oleh yang lain.

- e. *Tentang termasuk tidaknya tumpah darah/tempat kelahiran kita dalam konsep aqorib*

Tanah tempat kelahiran kita termasuk konsep aqorib, sesuatu hal yang dekat, sehingga harus kita cintai, karena sebagai tempat kita dibesarkan.

## Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Misi yang diemban gerakan/kelompok salafi yang terdapat di Pondok Pesantren Daarusy-Syifaa' Selong, intinya berupaya menegakkan syariat dan ajaran-ajaran Islam sesuai yang dilakukan oleh para salafus-shalih dalam rangka pemurnian pelaksanaan ajaran Islam dalam masyarakat, pada dasarnya mendasari pandangan-pandangan mereka tentang konsep kebangsaan. Akibatnya, dalam memandang aspek-aspek tertentu tentang 4 pilar wawasan kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika) – karena secara ketat mereka dasarkan kepada al-Quran dan al-Hadist – maka di samping ada yang sejalan dengan pandangan masyarakat pada umumnya, ada pula yang berseberangan/tidak sejalan. Pandangan mereka tentang 4 pilar wawasan kebangsaan, antara lain: a). NKRI: adanya kekuasaan negara merupakan kewajiban, karena tanpa kekuasaan, Islam tidak mungkin menjadi *rahmatan lil 'alamin*. Keberadaan negara merupakan naluri orang hidup. Keberadaan NKRI merupakan suatu hal yang wajib ada dalam tataran kebangsaan Indonesia dan harus dipertahankan.

NKRI sebenarnya negara Islam, tetapi kemudian dikhianati; b). Pancasila: sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang Muslim, Pancasila cukup relevan, namun hingga saat ini belum ada bukti nyata tentang siapa yang paling Pancasila-lais yang bisa dijadikan contoh/panutan dalam kehidupan masyarakat. Tentang Pancasila, dulu ada Piagam Jakarta, namun kemudian dikhianati para tokoh ketika itu; c). UUD 1945: setiap undang-undang ciptaan manusia tidak sempurna, sehingga tidak mungkin dapat mengayomi seluruh masyarakat dan bangsa. Sekalipun begitu, untuk dijadikan landasan konstitusi negara, UUD 1945 harus dikembalikan sebagaimana sebelum dikhianati, dengan memasukkan kembali 7 kata dalam Sila Pertama Pancasila: "... dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"; d). Bhinneka Tunggal Ika: keragaman merupakan sunnatullah yang perlu disyukuri. Jadi perbedaan suku, budaya dan agama tak perlu dipertentangkan, tetapi harus dijadikan kekuatan bangsa. Dalam konsep Islam, manusia di muka bumi berkewajiban menebar kedamaian, keadilan dan kemaslahatan, serta memelihara lingkungan. Dalam membangun dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap sesama perlu digalakkan silaturahmi, tanpa memandang suku, budaya maupun agama.

*Kedua*, Idealnya, 4 pilar wawasan kebangsaan di atas menurut kelompok salafi adalah: a). NKRI : untuk saat ini dipandang masih ideal, hanya saja pemerintahnya perlu diganti. Dalam suatu negara, idealnya setidaknya ada 2 pilar pokok yang harus menjadi penyangganya, yakni: sistem pemerintahan yang baik, dan pelaksanaannya harus orang-orang yang saleh; b). Pancasila: idealnya perlu ada sosok tokoh yang dapat dikategorikan sebagai seorang yang Pancasila-lais untuk

dapat diteladani yang lain; c). UUD 1945: perlu dikembalikan sebagaimana rumusan sebelum dikhianati, yakni dengan memasukkan kembali 7 kata dalam sila pertama Dasar Negara yang terdapat dalam preambuli UUD 1945; d). Bhinneka Tunggal Ika: pemahaman dan aplikasinya, khususnya tentang keragaman suku dan agama perlu didasarkan atas pemahaman sesuai dengan ajaran Islam.

*Ketiga*, Pandangan dan idealitas kelompok salafi tentang 4 pilar wawasan kebangsaan di atas, karena belum/tidak mereka aktualisasikan dalam bentuk aksi dan hanya bersifat pemikiran, maka sejauh ini tidak meresahkan di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Hal yang justru perlu diantisipasi yakni kemungkinan penyebar-luasan dakwah dalam rangka pemurnian ajaran Islam sesuai misi mereka. Apabila hal itu dilakukan terhadap kalangan Islam yang berbeda faham dengan mereka, maka dapat mengakibatkan gesekan yang berujung timbulnya konflik internal umat Islam.

Berdasarkan kesimpulan di atas khususnya terkait praktik dakwah pemurnian ajaran Islam, direkomendasikan agar kiranya kelompok salafi dalam aktifitas dakwahnya dilakukan terhadap kalangan/kelompoknya sendiri dalam upaya penguatan paham, tidak kepada masyarakat luas khususnya komunitas Islam yang berbeda paham keagamaannya. Dalam kaitan ini peran Kantor Kementerian Agama setempat menjadi penting untuk melakukan pemantauan, di samping melakukan pembinaan kepada ormas maupun lembaga Islam dalam rangka peningkatan kerukunan di kalangan internal umat Islam.

### Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram. *Mataram Dalam Angka 2010*. Mataram: BPS Kota Mataram, 2011.
- Esposito, John, L. *Contemporary Islam, Reformation or Revolution ?*, dalam *The Oxford History of Islam*. UK: Oxford Univ Press, 1999.
- Hakim, Bashori, A. *Studi Tentang Gerakan Dakwah di Kalangan Umat Islam di Kota Mataram*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2011.
- Kantor Kementerian Agama Kota Mataram. *Data Keagamaan Kota Mataram Tahun 2012*. Mataram: Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, 2012.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). *Data Keagamaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2012*. Mataram: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2012.
- Lawlor, Leonard, et all. *The Basic Problem of Phenomenology*. Bloomington USA: Indiana Univ. Press, 2002.
- Lewis, Bernard. *What Went Wrong: The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East*. London: Weidenfeld & Nicolson, 2002.
- Maududi, al., Abu A'la. *Khilafah dan Kerajaan*. Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1988.
- Nasr, S.V.R. "European Colonialism and The Emergence of Modern Moslem State," dalam John L. Esposito. *The Oxford History of Islam*. UK: Oxford Univ. Press, 1999.
- Natsir, M. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Nu'man, Hayyi, Abdul, TGH. & Mugni, Sn. *Mengenal Nahdlatul Wathan*. Selong: Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, 2005.
- Pondok Pesantren Islam Daarusy-Syifaa'. *Profil Pondok Pesantren Islam Daarusy-Syifaa'*, Selong: Pondok Pesantren Islam Daarusy-Syifaa', 2012.
- Ponpes Abu Hurairah Mataram. *Buku Pedoman Ponpes Abu Huairah Mataram, 2011-2016*. Mataram: Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, 2011.
- Simmons, John, A. *Theories of The State* dalam *The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy*. Cambridge Collections Online @ Cambridge Univ. Press, 2007.
- Suprpto. *4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Membangun Karakter Bangsa Indonesia Berdasarkan Wawasan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Bernegara (LPPKB), 2010.
- Sugiyarto, Wakhid (Ed.). *Direktori Kasus-Kasus Keagamaan: Aliran, Paham, Gerakan Keagamaan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- Wadjdi, Farid, dalam <http://hizbuttahrir.or.id>.